

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan utama berdirinya suatu pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang didasari oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, diantaranya adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Banyak indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengukur serta sebagai acuan upaya-upaya pelayanan masyarakat yang telah dilaksanakan. Salah satu indikator pelayanan pemerintah dalam upaya mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan adalah penerapan 17 *point* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 17 sasaran internasional dengan 169 capaian yang terukur dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai program global untuk membangun perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi baik sekarang dan juga masa depan. Tujuan ini dirancang bersama-sama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang dikemukakan pada 21 Oktober 2015 sebagai intensi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sasaran ini adalah pengganti sekaligus kelanjutan dari sasaran Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 yang sudah tidak berlaku lagi hingga akhir 2015. 17 sasaran tersebut diantaranya adalah tanpa kemiskinan; Tanpa kelaparan; Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan berkualitas;

Kesetaraan gender; Air bersih dan sanitasi layak; Energi bersih dan terjangkau; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; Industri, inovasi, dan infrastruktur; Berkurangnya kesenjangan; Kota dan komunitas berkelanjutan; Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; Penanganan perubahan iklim; Ekosistem laut; Ekosistem daratan; Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Istilah kata pelayanan sendiri diadopsi dari kata “layan” yang memiliki arti menolong, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhannya terhadap suatu pelayanan (Sinambela, 2010:3). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 tentang pelayanan publik menyebutkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasi, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan Prima bertitik tolak pada usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa (Ambia, 2018). Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang juga merupakan salah satu *Point* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pelayanan publik pada bidang pendidikan. Pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan serta hak bagi seluruh masyarakat di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan apa yang telah diamanPendidikan atkan oleh undang-undang. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu point dari 17 *point Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disusun pada Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015, tepatnya pada point nomor 4, yaitu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak

lepas dari pendidikan, oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu negara. Ditinjau dari nilai Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684. Dengan angka itu Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11). negara pemerintah berkewajiban untuk menghadirkan suatu pendidikan yang berkualitas kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali sebagai salah satu bentuk atau fungsi pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban untuk mendapatkan pelayanan pendidikan melalui program Wajib Sekolah dari pemerintah selama 12 tahun mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Demikian dengan apa yang tertera pada Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia yang diberlakukan oleh Kemendikbud, Wajib Sekolah yang dijamin oleh pemerintah kepada masyarakat adalah selama 12 tahun, artinya seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak serta kewajiban untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari pemerintah hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Perpanjangan durasi Wajib Belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi 12 tahun ini juga akan dipertegas dalam revisi UU SISDIKNAS yang baru.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Rendahnya kualitas

pendidikan yang terjadi bisa disebabkan oleh dua faktor diantaranya adalah buruknya sistem pendidikan yang digunakan serta kurangnya infrastruktur penunjang pendidikan yang dimiliki sehingga belum mampu menjamin seluruh warganya untuk mendapatkan hak pendidikan yang sesuai dengan program Wajib Belajar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Salah satu daerah yang memiliki kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah adalah Kabupaten Sukabumi. Menurut data yang diambil dari dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih tergolong cukup rendah, hal ini dibuktikan dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMA tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi yang hanya menyentuh angka sebesar 78,69 poin (3 besar terendah di Provinsi Jawa Barat), dari skor Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SMA di Kabupaten Sukabumi juga masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Barat, pada tahun 2019 APM Kabupaten Sukabumi hanya menyentuh angka sebesar 50,65 poin. Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) ini merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan yang berkualitas dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Kualitas Pendidikan di suatu daerah juga dapat diukur melalui indeks Pendidikan, indeks pendidikan dapat dijadikan sebuah gambaran mengenai seberapa baiknya pelayanan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah di daerahnya masing-masing semakin tinggi nilai indeks pendidikan yang diperoleh oleh suatu wilayah menandakan kualitas pendidikan di wilayah tersebut semakin baik. Berikut ini tabel yang menunjukkan data nilai indeks pendidikan di

setiap Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Barat mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021:

Tabel 1.1

Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat

| Wilayah Jawa Barat | Indeks Pendidikan | | |
|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Provinsi Jawa Barat | 62,57 | 63,22 | 63,73 |
| Kota Depok | 75,31 | 76,27 | 76,89 |
| Kota Bekasi | 75,86 | 76,09 | 76,87 |
| Kota Bandung | 75,22 | 75,28 | 76,11 |
| Kota Cimahi | 74,81 | 74,87 | 75,29 |
| Kota Bogor | 71,67 | 71,68 | 72,38 |
| Kota Sukabumi | 69,32 | 69,38 | 70,42 |
| Kota Cirebon | 69,42 | 69,48 | 70,21 |
| Kota Tasikmalaya | 67,77 | 68,46 | 69,12 |
| Bekasi | 65,80 | 66,76 | 67,39 |
| Kota Banjar | 65,46 | 65,52 | 66,01 |
| Ciamis | 63,94 | 64,72 | 65,78 |
| Bandung | 64,52 | 65,12 | 65,51 |
| Sumedang | 63,57 | 64,39 | 64,46 |
| Bogor | 62,27 | 62,33 | 62,39 |
| Purwakarta | 60,01 | 60,61 | 60,67 |
| Bandung Barat | 60,21 | 60,27 | 60,33 |
| Kuningan | 58,21 | 59,18 | 59,97 |
| Tasikmalaya | 58,68 | 59,31 | 59,77 |
| Pangandaran | 59,07 | 59,33 | 59,72 |
| Karawang | 59,06 | 59,48 | 59,54 |
| Garut | 57,87 | 58,15 | 58,52 |
| Majalengka | 57,55 | 58,18 | 58,34 |
| Cirebon | 56,37 | 57,09 | 57,75 |
| Sukabumi | 57,34 | 57,54 | 57,67 |
| Cianjur | 56,51 | 57,24 | 57,30 |
| Subang | 55,31 | 56,17 | 56,23 |
| Indramayu | 53,97 | 55,03 | 55,79 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (diakses pada Selasa 15 November 2022)

Nilai indeks pendidikan didapat dari dua elemen pembentuk, yaitu angka melek huruf dan angka harapan lama sekolah. Dilihat dari nilai indeks pendidikan yang disajikan pada tabel 1.1, Kabupaten Sukabumi masih masuk kedalam 5 besar nilai indeks pendidikan terendah di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 57,67 jauh dibawah rata-rata indeks pendidikan di Provinsi Jawa Barat yakni 63,73. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan ataupun kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih belum optimal.

Sementara dari segi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sukabumi sendiri, belum diketahui apakah sebarannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, namun dari jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan hanya terdapat 26 SMA Negeri dari total 47 Kecamatan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga belum merata karena masih banyak Kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang sama sekali belum terdapat SMA Negeri. Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan atau kerjasama dengan pihak lain. Berbagai lembaga harus saling berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media yang tertuang dalam konsep pentahelix.

Selain pemerintah Kabupaten Sukabumi sebenarnya sudah banyak aktor-aktor dari berbagai kalangan yang telah memberikan peran serta upayanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Sebagai contoh upaya

dari aktor swasta yang memberikan dana bantuan pendidikan untuk siswa putus sekolah dari PT. Semen SCG Sukabumi kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018, namun upaya tersebut dinilai kurang efektif hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya angka partisipasi murni dan kasar pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Karena pada dasarnya sesuai dengan UU SISDIKNAS yang menyatakan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas secara gratis sehingga permasalahan buruknya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Kurang efektifnya upaya yang dilakukan oleh PT. Semen SCG Sukabumi ini dikarenakan tidak ada kerjasama resmi antara pihak swasta dan pemerintah sehingga dalam upaya yang dilakukan oleh masing-masing aktor tidak ada proses perencanaan, serta pengelolaan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Aktor dari kalangan masyarakat yang terjalin dalam wadah Yayasan juga sebenarnya sudah lama memberikan banyak upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, salah satu upaya yang diberikan adalah dengan membuka sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi sendiri jumlah sekolah tingkat menengah atas paling banyak berstatus sebagai sekolah swasta dengan lebih dari 200 sekolah dibandingkan dengan sekolah negeri yang hanya ada 26 sekolah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat melalui Yayasan selaku Lembaga *non-profit* memainkan peran yang tidak kalah penting dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sebagai salah satu

haknya. Namun di Kabupaten Sukabumi sendiri mayoritas sekolah swasta yang ada berlokasi di wilayah-wilayah tertentu yang mendekati wilayah perkotaan atau daerah urban seperti Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cibadak, dan Kecamatan Sukaraja sehingga masih banyak Kecamatan lain yang masih kekurangan jumlah sekolah, sebagai contoh Kecamatan Purabaya yang hanya memiliki 1 sekolah Swasta dan tidak ada satu pun sekolah negeri jenjang SMA di Kecamatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan antara pemerintah dengan pihak Yayasan juga belum terjalin dengan baik, padahal dengan tingkat partisipasi masyarakat melalui Yayasan yang cukup tinggi dalam sektor pendidikan bila disertai dengan komunikasi serta perencanaan dalam ikatan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah dapat menjadikan peran dari Yayasan sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, merujuk kepada Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa Indonesia menerapkan adanya wajib belajar bagi seluruh masyarakat pada jenjang pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Bukan tanpa alasan, Undang-Undang tersebut disusun dan ditetapkan dalam rangka keberlangsungan negara, sebab di Indonesia, pendidikan merupakan sektor penting. Pendidikan tergolong ke dalam indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama dengan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini

berarti bahwa perlu adanya daya dukung yang kuat dari pemerintah terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang menyangkut keberlangsungan negara.

Kolaborasi model helix adalah model pengembangan sosial ekonomi yang mendorong pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan inovasi dan kewirausahaan melalui kerjasama dan kemitraan yang berdampak baik antara akademisi, pemerintah, industri, LSM dan wirausahawan (Tonkovic, Veckie, & Veckie, 2015). Aktor-aktor yang terlibat dalam konsep model helix memiliki peran, fungsinya serta jaringannya masing-masing yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, tentunya bila salah satu fungsi yang dilakukan oleh salah satu aktor tidak berjalan maksimal maka upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh aktor lain pun akan menjadi lebih sulit, peran-peran yang dimiliki oleh beberapa aktor tersebut diantaranya adalah:

- 1) Akademisi

Akademisi sebagai aktor yang selalu dilibatkan dalam kebijakan, memiliki keahlian dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Inovasi menjadi kata kunci dalam keterlibatan akademisi, pada penyebaran informasi maupun penerapan teknologi, kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang bermanfaat antara akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas dan media massa. Keterlibatan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sukabumi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, serta sosial ekonomi setempat.

2) Bisnis

Terdapat banyak badan usaha yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, baik perusahaan nasional maupun internasional. Banyaknya perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi ini seharusnya memberikan keuntungan bagi sektor pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Sejatinya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi kebanyakan memperkerjakan masyarakat local Kabupaten Sukabumi, sehingga perusahaan pun melalui pemberian dana CSR turut teras berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Kabupaten Sukabumi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang jauh lebih berkualitas dan mampu bersaing secara global.

3) Komunitas

Bukan saja hanya menjadi objek, masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam konsep kolaborasi helix. Masyarakat memiliki peran dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Peran masyarakat diantaranya, dimulai dari perencanaan hingga pada implementasi pembangunan kualitas di daerah.

4) Pemerintah

Birokrasi pemerintah daerah yang diharapkan terlibat dalam model helix peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi yaitu Dinas ataupun Lembaga Teknis Daerah yang memiliki peran dalam urusan pendidikan dan kebudayaan, perencanaan peningkatan kualitas

pendidikan yang tersusun dalam Rencana Strategis (Renstra), serta penyedia akses dan infrastruktur berkaitan dengan pendidikan. Birokrasi sebagai pemeran utama dalam pengimplementasian kebijakan publik, bersama dengan badan legislatif bertanggung jawab atas pengimplementasian suatu kebijakan. Legislatif juga terlibat sebagai pihak yang ikut menentukan berbagai peraturan tertentu, serta menjalankan peran legislasi, budgeting, dan controlling.

5) Media

Salah satu aktor dalam pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah media massa. Media massa sebagai pengawas independent yang berperan dalam pengelolaan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh aktor-aktor tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah masih kurangnya sumber daya pengajar baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta infrastruktur penunjang pendidikan yang belum memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara ideal Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya memerlukan bantuan dari aktor-aktor lain yang tergabung kedalam kolaborasi model helix dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Namun upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing aktor pun belum memiliki ikatan koordinasi yang baik sehingga pada pelaksanaannya setiap aktor selalu menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dihadapi sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan

kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya belum ada pembagian peran yang jelas yang melibatkan para aktor terkait peran apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu dengan menggunakan kolaborasi model helix diharapkan dapat membangun koordinasi serta relasi yang baik diantara para aktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Model helix tidak hanya memberikan konsep kolaborasi namun juga memperjelas tugas, fungsi dan kewajiban dari setiap aktor yang terkait agar relasi yang terjalin dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara maksimal dan efektif.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum teridentifikasi mengenai siapa saja aktor yang terlibat dan bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
2. Belum teridentifikasi mengenai bagaimana peran dari aktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
3. Belum teridentifikasi bagaimana model jaringan yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang memuat permasalahan yang timbul dari beberapa faktor diatas, maka perlu disusun terlebih dahulu rumusan masalah yang dapat melandasi kegiatan penelitian yang dilakukan. Berikut ini

dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

1. Siapa saja lembaga/aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana peran lembaga/aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi?
3. Model jaringan apa yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi?

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dimaksud, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis lembaga/aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
2. Menganalisis peran lembaga/aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
3. Menganalisis model jaringan antar aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik dan analisisnya khususnya dalam konsentrasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan suatu strategi dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan publik, bermanfaat juga untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam dunia masyarakat dan menghadapi dinamika dalam pelayanan publik.

B. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan agar dapat berjalan lebih optimal, selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

pembentukan program kegiatan yang saling sinergis antar lembaga untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi.

C. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pemilihan alternatif kebijakan dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang.

D. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang berkualitas.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan berbagai penelitian yang sebelumnya telah diteliti serta berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berasal dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, naskah akademik, dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dapat membantu menemukan bahan yang sebanding sehingga mendapatkan pandangan baru untuk melakukan penelitian berikutnya. Selain itu penelitian terdahulu juga meringankan peneliti untuk membuktikan dan memberi kesimpulan terkait keaslian peneliti.

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, umumnya membahas mengenai peran stakeholder dengan teorinya masing-masing. Peneliti akan mendeskripsikan secara singkat penelitian terdahulu berdasarkan kesamaan teori yang digunakan. Matriks penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui kebaruan penelitian sehingga tidak terjadi plagiasi. Dari matriks penelitian terdahulu diatas yang terdiri dari 5 penelitian dalam negeri dan 5 penelitian luar negeri yang secara garis besar membahas mengenai kolaborasi dan peran aktor terkait dalam mencapai suatu tujuan yang sama antara aktor-aktor terkait tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu menyuguhkan hasil penelitian yang kurang lebih menyatakan bahwa dukungan serta kolaborasi antar aktor yang baik sangat dibutuhkan oleh pemerintah selaku aktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan-pelayanan publik. Tidak adanya pembagian peran yang jelas yang melibatkan para aktor terkait peran apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik menyebabkan hubungan kolaborasi antar aktor tidak memiliki ikatan koordinasi yang baik pada pelaksanaannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik akan mengakibatkan setiap aktor yang selalu menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dihadapi sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Jika dianalisis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat banyak kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah diantaranya pada penelitian

terdahulu berfokus untuk meneliti peran aktor terkait dalam meningkatkan pariwisata, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus meneliti peran dan jaringan yang telah dibangun oleh para actor dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di daerah, selain itu pada penelitian ini peneliti juga tidak hanya mencoba menilite peran yang dilakukan oleh masing-masing aktor dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pekayanan melainkan peneliti juga mencoba untuk menganalisis jenis jaringan yang terbentuk dari masing-masing peran yang dilakukan oleh setiap aktor-aktor terkait. Penelitian ini juga tidak menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert untuk mengukur data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana akan menganalisis peran serta jaringan actor terkait dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya persamaan yang hampir mendekati mengenai permasalahan yang terdapat dalam mengidentifikasi peran serta membangun jaringan antara actor-aktor terkait dalam upayanya untuk mencapai tujuan bersama yang telah di tentukan. Meski adanya kemiripan dalam menganalisis atau memaknai objek penelitian, namun tujuan yang akan diteliti berbeda. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tergolong dalam penelitian yang baru. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan memberikan sebuah wawasan baru mengenai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi melalui kolaborasi model helix.

1.4.2. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Yeremias T. Keban, 2014:3) adalah metode pengkoordinasian dan pengorganisasian personel dan sumber daya publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan memajemen ketentuan-ketentuan suatu kebijakan publik. Pengertian administrasi publik juga dikemukakan oleh Nicholas Henry (dalam Yeremias T. Keban, 2014:6), bahwa administrasi publik merupakan suatu kesatuan yang rumit antara teori dengan praktik yang bertujuan untuk mempromosikan pandangan terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, serta untuk merubah kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Administrasi publik adalah ilmu serta seni untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan publik melalui perbaikan dan perumusan kebijakan-kebijakan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Terdapat tiga paradigma dalam administrasi publik, yang pertama adalah *Old Public Administration* (OPA) yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson menyatakan bahwa administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Dalam paradigma OPA dapat dipelajari bahwa untuk membangun birokrasi diperlukan profesionalitas, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan dan standarisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Kedua, *Paradigma New Public Management* (NPM) yang didasarkan pada teori pasar dan budaya bisnis dalam organisasi publik. Di dalam NPM, para elite birokrasi cenderung berkompetisi

untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Dasar NPM sendiri adalah teori *Public Choice* yang sangat didominasi oleh kepentingan pribadi (self-interest) sehingga konsep *public spirit*, *public service*, dan sebagainya terabaikan. Paradigma terakhir yaitu *New Public Service* (NPS) oleh J.V.Dendhart dan R.B.Denhart menyatakan bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai dan standard yang ada dan menghargai masyarakat.

Administrasi publik sendiri dibagi menjadi dua bidang yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Menurut Overman (dalam Keban, 2014:92) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling disatu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Sedangkan kebijakan publik menurut Kamus Administras Publik (Chandler dan Plano dalam Keban, 2014:60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

1.4.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma yang pertama biasa disebut dengan paradigma dikotomi Politik administrasi digunakan pada tahun 1900 hingga tahun 1926. Paradigma ini menggaris

bawahi dimana seharusnya administrasi negara itu berada, paradigmanya dikemukakan oleh Frank J. Goodnow dan Lenand D. White yang mengatakan bahwa administrasi negara semestinya berorientasi pada birokrasi pemerintahan. Akan tetapi pandangan ini menimbulkan persilangan diantara para akademisi dan praktisi perihal dikotomi politik-administrasi. Disampaikan bahwa administrasi negara merupakan sub bidang ilmu politik.

Paradigma kedua dikemukakan oleh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick pada tulisannya yang berjudul *Paper on the Science of Administration* yang dikenal dengan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). POSDCORB merupakan istilah yang mencakup tanggung jawab eksekutif terhadap suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

Paradigma ketiga merupakan pemahaman perihal administrasi negara sebagai ilmu politik yang mulai dikembangkan pada tahun 1950-1970. Paradigma ini berupaya untuk menentukan kembali relasi konseptual antara ilmu politik dengan administrasi negara. Memasuki tahun 1962 administrasi negara tidak lagi digolongkan sebagai cabang dari ilmu politik. Menurut Keban, Yermias T. (2008) timbul pandangan baru yang masih menempatkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik dengan birokrasi pemerintahan sebagai lokusnya. Pada akhir dari paradigma di masa ini administrasi negara menghadapi krisis identitas karena ilmu politik dipandang disiplin ilmu yang sangat dominan dalam administrasi publik.

Paradigma keempat pada periode 1956-1970 merupakan periode dimana administrasi negara dianggap sebagai ilmu administrasi. Prinsip pengembangan manajemen diterapkan kembali secara ilmiah dan mendalam seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, serta penerapan teknologi modern. Pada masa ini ada dua jenis administrasi negara yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang didasarkan oleh pengaruh psikologi sosial dan ilmu administrasi yang menjelaskan mengenai *public policy*. Sejumlah pengembangan dimasa ini seperti pada tahun 1960, Keith M. Henderson beranggapan bahwa teori organisasi semestinya menjadi topik utama dari administrasi negara. Sehingga berkembang pandangan *Organizational Development* (OD) atau Pengembangan Organisasi secara pesat sebagai spesialisasi dari ilmu administrasi.

Paradigma kelima mulai dikembangkan dan digunakan pada tahun 1970 yang mengklasifikasikan administrasi negara sebagai administrasi negara. Pengembangan administrasi negara tidak hanya ditetapkan pada lokus administrasi negara sebagai ilmu murni namun juga mengenai pengembangan teori organisasi. Pandangan terhadap teori organisasi utamanya ditujukan kepada pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana keputusan dibuat dan diambil dalam organisasi. Akhirnya berkembang disiplin ilmu kebijaksanaan (*policy science*), politik ekonomi, proses kebijakan pemerintah dan analisisnya dan cara pengukuran kebijakan. Setelah perkembangan paradigma seperti diuraikan diatas dikemukakan oleh Nicholas Henry, pada tahun 1982 terdapat pendapat yang merinci beberapa aliran dalam administrasi publik yaitu aliran proses administrasi yang

meliputi aliran empiris, pengambilan keputusan, matematik dan aliran sistem administrasi *holistic* yang terdiri dari aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial dan aliran integratif (Keban, Yermias T, 2005).

Paradigma ke-enam administrasi negara baru. Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi dapat berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat.

1.4.4. Manajemen Publik

Manajemen publik dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Atau dengan kata lain, manajemen pelayanan publik berarti suatu proses perencanaan dan pengimplementasiannya serta mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Menurut Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen public juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Shafritz dan Russel (dalam Kebab,

2008:93) Mengartikan manajemen publik sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen Pelayanan Publik berkenaan dengan tata-kelola pelayanan yang berpangkal dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik menginovasi pelayanan yang dilakukan agen publik dalam memobilisasi sumber (pencapaian tujuan) dan alokasi sumber (adaptasi kepentingan publik) guna menyediakan pelayanan barang/jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memiliki daya ungkit atau daya dorong terjadinya peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat dan martabat bangsa sebagai owner negara bangsa.

Dari penjelasan para ahli yang telah mengemukakan pengertian manajemen publik di atas dapat disimpulkan bahwasanya manajemen publik ialah studi interaisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti, *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan publik.

1.4.5. Jejaring Kebijakan

Pemerintah selaku pelaku utama dalam mengimplementasikan kebijakan publik pada dasarnya selalu memerlukan bantuan-bantuan politik, legitimasi, informasi, dan partner koalisi. Disisi lain pemangku-pemangku kepentingan memiliki keinginan akan akses terhadap proses perumusan dan pengimplementasian kebijakan public. Perbedaan keinginan antara para

pemangku kepentingan inilah yang melatarbelakangi timbulnya pertukaran dan transaksi. Transaksi maupun pertukaran merupakan dinamika yang hadir dalam proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Proses ini kemudian membentuk kolaborasi masing-masing aktor yang terlibat. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka informasi, preferensi dan pengetahuan akan masalah kebijakan yang ingin dipecahkan dapat menjadi lebih jernih.

Dalam perspektif jaringan kebijakan, Frans Van Waarden (1992), mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan (*policy network*). Dimensi-dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Berikut ini adalah dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud :

- 1) Aktor

Pada penyusunan kebijakan, aktor berhubungan dengan jumlah orang yang terlibat. Kemudian faktor ini yang menentukan bentuk dari jaringan yang akan dijalin. Setelah itu sifat jaringan kebijakan yang terjalin akan dipengaruhi oleh jenis aktor dari *background* yang berbeda-beda. Aktor dalam jaringan kebijakan terdiri dari individu-individu tetapi bisa juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai perwakilan dari kelompok/pihak tertentu.

- 2) Fungsi

Jaringan merupakan media komunikasi yang berbentuk dalam beberapa kegunaan. kegunaanya bergantung pada keperluan, kepentingan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep fungsi ini menimbulkan penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang dipakai untuk mengembangkan intensitas hubungan kolaborasi antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

3) Struktur

Struktur jaringan kebijakan berkaitan dengan bentuk relasi antar aktor-aktor yang terlibat.

4) Pelembagaan

Tahapan pelembagaan berkaitan dengan karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan terpengaruh dengan bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.

5) Aturan Bertindak

Jaringan selanjutnya terbentuk dari kebiasaan atau aturan bertindak dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*),

sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang social dan pendidikan (*social and intellectual-educational background*) para aktor yang terlibat.

6) Hubungan Kekuasaan

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah power relation yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

7) Strategi Aktor

Dalam jaringan kebijakan, aktro-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

1.4.6. Identifikasi Aktor

Aktor merupakan orang, kelompok orang, ataupun institusi tertentu yang menaruh ketertarikan dan memberikan pengaruh dalam proses perumusan suatu keputusan dalam program. Aktor awalnya disebut dengan istilah "*stakeholders*" yang dipakai dalam disiplin ilmu bisnis (ekonomi), namun dengan perkembangan wirausaha birokrasi pemerintah, istilah *stakeholders* juga mulai digunakan di dalam dunia administrasi publik, sebagaimana banyak teori bisnis lain yang diadopsi. *Stakeholder* atau aktor pada awalnya adalah sebuah konsep yang

berujuk pada seseorang sebagai pemilik modal ataupun properti lainnya yang berpengaruh besar. Berbagai pengertian tentang *stakeholders* namun pada umumnya memiliki pengertian sebagai kelompok kepentingan ((Brenner dan Cochran, 1991; Clarkson, 1995; Donaldson dan Preston, 1995), disusul kemudian Freeman (1994) memperkenalkan konsep manajemen *stakeholder*; dalam (Suwitri, 2008:68)).

Aktor kebijakan digambarkan sebagai orang maupun kelompok orang yang memiliki relasi keterbutuhan antar satu sama lain dalam proses kebijakan, baik yang berasal dari internal organisasi pemerintah maupun yang dari luar organisasi pemerintah seperti swasta dan masyarakat (Suwitri dalam (Yuniningsih, 2018: 79)).

Identifikasi aktor dalam penelitian ini dilihat dari tahap implementasi kebijakan. Menurut Anderson (2003) dalam (Yuniningsih, 2018: 95-100), aktoraktor kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Birokrasi

Birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam tahap implementasi sebuah kebijakan karena hal tersebut erat dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing agar dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya dalam wilayah operasi terkait.

2. Badan Legislatif

Penentuan peraturan yang spesifik dalam tahap implementasi kebijakan di bidang tertentu, memerlukan adanya campur tangan lembaga legislatif.

3. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan sebagai cabang yudisial yang menangani hukum publik, keterlibatannya dalam implementasi kebijakan juga diperlukan terutama saat muncul tuntutan dari masyarakat atas pelaksanaan kebijakan tertentu yang dianggap memberikan dampak yang merugikan. Hal tersebut berpotensi menjadi perkara hukum.

4. Kelompok Kepentingan

Kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan yang dijadikan acuan atau pedoman implementasi suatu kebijakan. Tindakan menekan kebijakan pemerintah dimaksudkan agar kelompok kepentingan tertentu memperoleh keuntungan sesuai dengan kepentingan yang dimiliki dalam implementasi program tersebut.

5. Organisasi-Organisasi Masyarakat

Masyarakat baik secara individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi suatu program, baik sebagai objek atau subjek program tersebut.

Identifikasi aktor dilakukan untuk melihat bagaimana keterlibatan atau peran aktor dalam setiap tahap pelaksanaan suatu program. Blackma(2003) dalam

modul *Project Cycle Management*, menjelaskan bahwa identifikasi terhadap aktor yang terlibat diawali dengan identifikasi tingkat ketertarikan aktor.

Tabel 1.2

Tingkat Ketertarikan Aktor

| Aktor Kebijakan | Ketertarikan | Pengaruh | Prioritas |
|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Aktor Primer | | | |
| Aktor Sekunder | | | |

Sumber: Blackman, (2003: 22)

Pembentukan tabel tersebut dipakai sebagai pengelompokan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program berdasarkan ketertarikannya. Selain itu, dari tabel tersebut dapat diidentifikasi aktor mana yang termasuk ke dalam aktor primer dan aktor mana yang termasuk ke dalam aktor sekunder. Aktor yang termasuk dalam aktor primer adalah sekelompok orang atau institusi yang kehadirannya mendapatkan keuntungan dari atau tergantung oleh sumber daya atau layanan atau bidang dalam pelaksanaan suatu program. Mereka memiliki keterbatasan jika dihadapkan dengan pilihan dalam perubahan program, sehingga agak sulit beradaptasi. Sementara aktor sekunder adalah sekelompok orang atau institusi yang mempunyai ketertarikan pada pelaksanaan sebuah program dan kehadiran aktor tersebut dipertimbangkan. Selanjutnya, tingkat pengaruh aktor-aktor tersebut juga dimasukkan ke dalam tabel. Sedangkan penilaian tingkat prioritas akan diberikan berdasarkan data yang sudah

didapatkan oleh peneliti dan simpulan dari penelitian. Penilaian 1 untuk prioritas terendah dan penilaian tertinggi diberikan angka 5. Blackman (2003) menjelaskan penilaian tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Apabila ketertarikan aktor tidak berpengaruh dan hanya menguntungkan satu pihak saja, maka penilaian diberi angka 1
- Apabila ketertarikannya memiliki pengaruh negatif (-) dan tidak terlalu banyak memberikan keuntungan, maka penilaian diberi angka 2
- Apabila ketertarikan aktor menghasilkan pengaruh positif (+) dan negatif (-) secara bersamaan yang berarti ketertarikan tersebut memberikan dampak baik dan buruk, maka penilaian diberi angka 3
- Apabila ketertarikan aktor menghasilkan pengaruh positif (+) tetapi masih meninggalkan pihak yang tidak diuntungkan atau memiliki dampak besar, maka penilaian diberi angka 4
- Apabila ketertarikan aktor memberikan dampak yang besar dan menguntungkan semua pihak yang ada, maka penilaian diberi angka 5

1.4.7. Peran Aktor

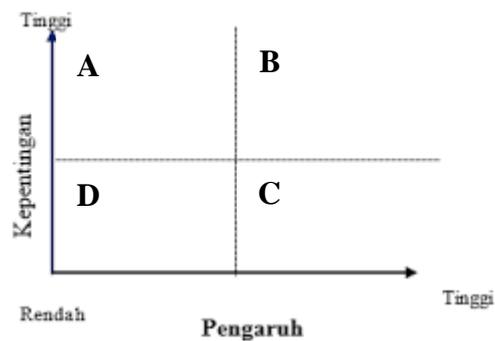
Blackman (2003) mengemukakan bahwa untuk mengidentifikasi peran aktor, maka sebelumnya diklasifikasikan identifikasi antara pengaruh dan kepentingan dari masing-masing aktor. Pengaruh merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu sehingga mempengaruhi dampak pada hasil akhir pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dijadikan sebagai acuan seberapa besar kekuasaan aktor. Kemudian kepentingan adalah

kebutuhan yang dimiliki oleh aktor tertentu yang dapat didasari oleh kegiatan atau hasil akhir kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Identifikasi pengaruh dan kepentingan aktor dengan menggunakan tabel kombinasi pengaruh dan kepentingan, dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan terhadap aktor-aktor yang kepentingannya mungkin akan terdampak secara negatif, guna mencegah konflik dan kegagalan pelaksanaan program tersebut.

Gambar 1.1

Pengaruh dan Kepentingan Aktor



Sumber: Blackman, 2003: 24

Pada gambar 1.2, terdiri dari kohesi A,B,C, dan D, setiap kohesi memiliki maksud yang berbeda. Diantaranya:

- Kohesi A. Aktor dengan kepentingan tinggi dan pengaruh yang rendah
- Kohesi B. Aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang tinggi
- Kohesi C. Aktor dengan pengaruh tinggi dan kepentingan rendah
- Kohesi D. Aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah

Selanjutnya, Blackman (2003) melihat bagaimana keterlibatan/peran masing-masing aktor dalam setiap tahap pengembangan sebuah program dengan cara mengklasifikasikannya kedalam sebuah tabel.

Tabel 1.3
Identifikasi Peran Aktor

| | | Jenis Peran | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | Informan | Konsultan | Kerjasama | Kontrol |
| Tahap dalam pengembangan | Identifikasi | | | | |
| | Desain | | | | |
| | Implementasi dan pengawasan | | | | |
| | Tinjauan | | | | |
| | evaluasi | | | | |

Sumber: Blackman, 2003: 24

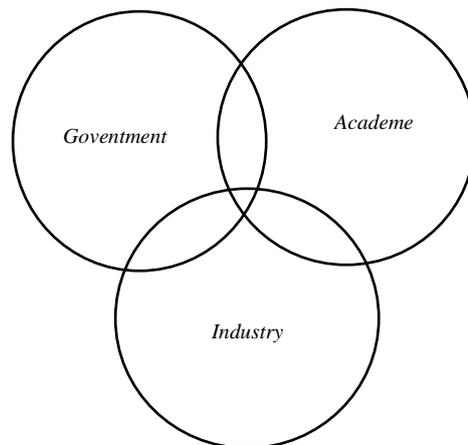
Tahapan-tahapan pada jenis peran diklasifikasikan menjadi informan, konsultan, kerjasama, dan kontrol. Aktor yang menyediakan informasi dalam peningkatan program disebut informan. Selanjutnya aktor yang berperan sebagai pihak untuk dimintai pendapat dalam peningkatan suatu program disebut sebagai konsultan. Aktor dengan jenis peran Kerjasama merupakan peran yang mengharuskan aktor saling menjalin kerjasama dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan suatu program. Jenis peran terakhir adalah kontrol, dimana aktor dengan peran ini bertindak sebagai aktor yang melakukan pengawasan berdasarkan faktor prioritas dalam pengembangan suatu program.

1.4.8. Model Jaringan Aktor

1. *Triple Helix*

Gambar 1.2

Triple Helix



Sumber: Tonkovic dkk., 2015: 389

Praswati (2017) mengemukakan bahwa Etzkowitz dan Leydesdorff merupakan ahli yang pertama kali memformulasikan model Triple Helix pada periode 1995. Kelompok kepentingan pada jaringan ini terdiri dari Industri sebagai aktor yang diharapkan mampu mengembangkan inovasi, Universitas untuk menciptakan dan memberikan pertimbangan berdasarkan ilmu pengetahuan, serta Pemerintah selaku perumus kebijakan publik. Ketiganya berkolaborasi menggunakan pendekatan *top-down* sehingga tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara. Hubungan antara komponen *Triple Helix* berlandaskan dengan kolaborasi berbasis obyektif dan substitusi fungsional dalam menciptakan inovasi. Kerjasama berbasis

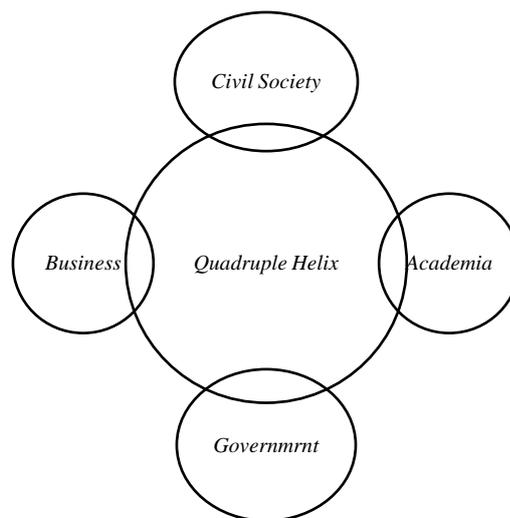
obyektif berarahkan konvergensi kepentingan semua pihak terlibat yang telah memilih secara strategis untuk bekerja sama sambil tetap menjalankan fungsinya.

Kurang dari 10 tahun yang lalu, para periset, praktisi dan pembuat kebijakan mulai melakukan pengembangan menggunakan pendekatan inovasi yang lebih baik dari pada *Triple Helix* dan mencoba untuk mengatasi kekurangan yang terkait dengan pembentukan paradigma teknologi.

2. *Quadruple Helix*

Gambar 1.3

Quadruple Helix



Sumber: Tonkovic, dkk, 2015: 390

Arnkil dkk. dalam (Praswati, 2017) menjelaskan pentingnya mempeluas konsep inovasi model *Triple Helix* dengan keterlibatan masyarakat, karena *Triple Helix* dapat dipandang sebagai upaya sistematis untuk mecapai inovasi penelitian /inovasi berbasis teknologi, *Quadruple Helix* juga bisa dipandang sebagai cara sistematis untuk mengejar

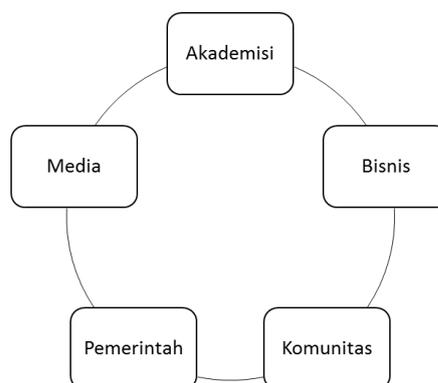
keinginan atau inovasi yang berfokuskan kepada pengguna. Semenjak itu, literatur mengenai model inovasi yang didasarkan pendekatan heliks telah berkembang.

Praswati (2017) juga mengungkapkan bahwa berkembangnya model *Triple Helix* menuju *Quadruple Helix* terjadi sejak Carayannis dan Campbell menginovasikan pengikutsertaan peran serta masyarakat sipil dalam relasi yang sudah terjadi sebelumnya antara industri, universitas, dan pemerintah. Masyarakat sipil dalam hal ini berperan sebagai konsumen barang dan jasa serta selaku subjek sekaligus objek dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dikatakan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap sistem inovasi. Hadirnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin berkembang memberikan kemudahan untuk masyarakat sipil dalam berpartisipasi pada sistem inovasi tertentu yang pelaksanaannya dilakukan secara bottom-up.

3. *Penta Helix*

Gambar 1.4

Penta Helix



Sumber: Yuniningsih, 2018: 123

Model *pentahelix* pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata 2014-2019 yaitu Arief Yahya, yang dimaksud *pentahelix* adalah kolaborasi lima aktor atau *stakeholder*, yaitu: *academician*, *bussiness*, *community*, *government* dan *Media*, biasa disingkat dengan ABCGM. Menurut Soemaryani (dalam Yuniningsih, 2019:137), model *pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat (dalam Yuniningsih, 2019:139) bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *pentahelix* berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.

Menurut Lindmark (2009) model *Pentahelix* merupakan perluasan dari strategi tiga helix dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Lima komponen dari *Pentahelix* tersebut memiliki kontribusi yang saling berkaitan diantaranya:

- 1) Akademisi (*academics*) adalah sumber daya pengetahuan. Mereka memiliki konsep, teori dalam mengembangkan program.
- 2) Bisnis (*business*) adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas dalam mengolah barang atau jasa untuk menjadi berharga.

- 3) Komunitas (*community*) adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan masalah atau kasus yang berkembang.
- 4) Pemerintah (*government*) adalah salah satu *stakeholders* yang memiliki regulasi dan reponsibility dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- 5) Media (*media*) adalah pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memainkan peran yang kuat dalam mempromosikan pendidikan.

Lebih lanjut (Soemaryani, 2016; Rampersad, 2017) menyebutkan bahwa model *Pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan dan bahwa kolaborasi *Pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain didalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *Pentahelix* berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.

Terdapat beberapa pendapat mengenai lima aktor dalam model *Pentahelix*. Namun model *Pentahelix* lebih dikenal dengan konsep atau rumusan ABCGM yaitu *Academician, Business, Community, Government, dan Media* (Slamet dkk, 2017). Kunci utama kesuksesan inovasi ini adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi.

1.4.9. Manajemen Pendidikan

1. Manajemen

Konsep manajemen memiliki arti yang lebih luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. James A Stoner mendefinisikan manajemen sebagai berikut “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut, Stoner telah menggunakan kata proses bukan seni. Manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan pribadi, sedangkan proses adalah cara yang sistimatis untuk melakukan pekerjaan.

Dalam pengertian umum, suatu masyarakat ataupun organisasi dan kelompok memerlukan adanya pengelolaan dan cara agar suatu pekerjaan dapat terselesaikan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen selalu memiliki tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilakukan. Tujuan tersebut merupakan sasaran sebelum kegiatan dilakukan, tujuan tersebut merupakan sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan yang diatur manajemen.

2. Pendidikan

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk

mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Sementara itu menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

3. Manajemen Pendidikan

Menurut Stephen J. Kneziech manajemen pendidikan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan, sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulasi dan koordinasi personil dan iklim organisasi yang kondusif, serta menentukan perubahan

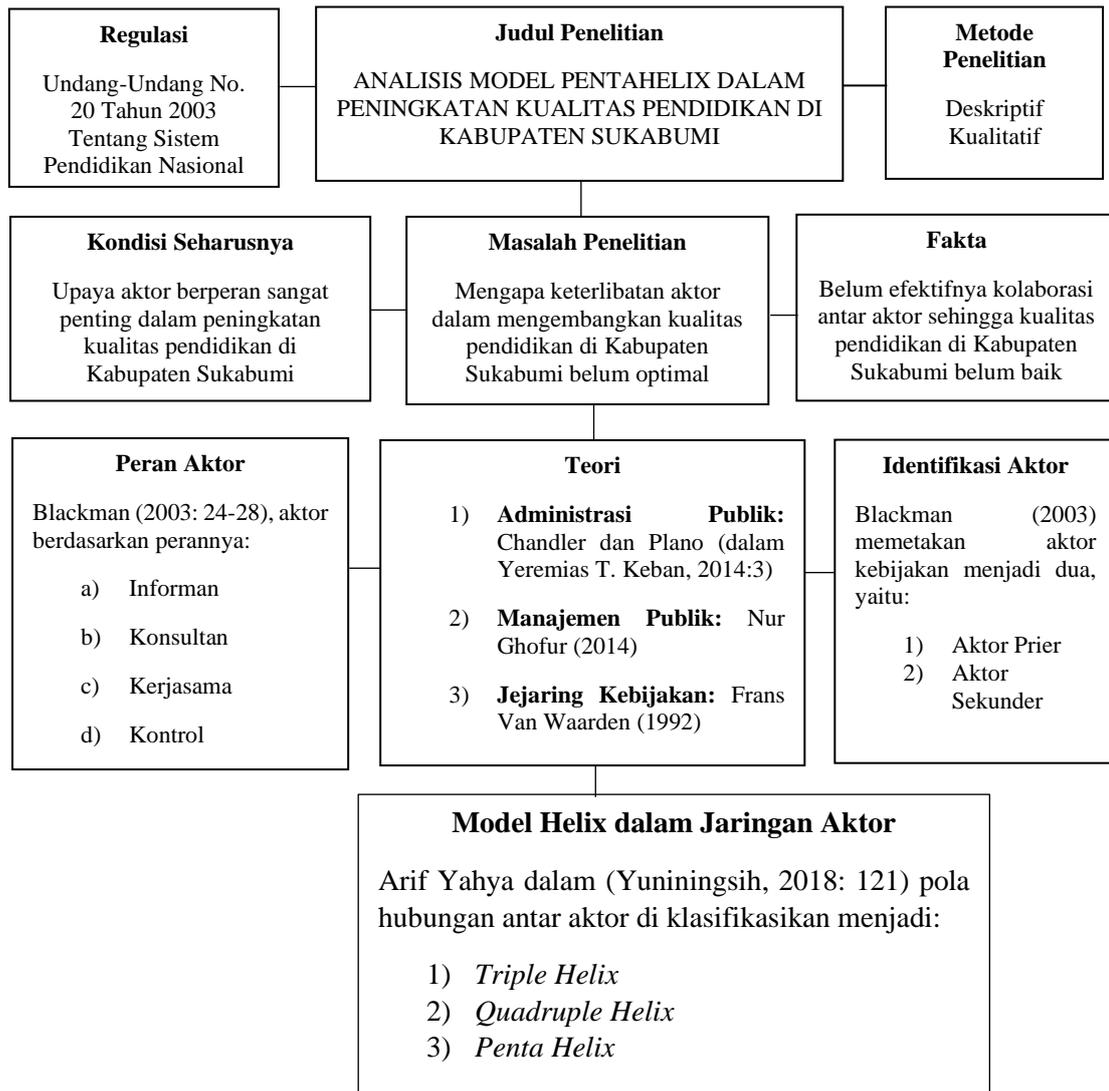
esensial fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat di masa depan.

Sedangkan menurut Biro Perencanaan Depdikbud (1993:4). Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan.

1.5. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.5

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten melalui kolaborasi model helix yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi selaku aktor utama dan aktor-aktor lainnya yang terkait. Kelima aktor yang terlibat dalam konsep pentahelix memiliki peran, fungsinya serta jaringannya masing-masing yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, tentunya bila salah satu fungsi yang dilakukan oleh salah satu aktor tidak berjalan maksimal maka upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh aktor lain pun akan menjadi lebih sulit.

Dalam identifikasi masalah telah diuraikan mengenai kondisi kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Kolaborasi yang terjalin antar aktor di Kabupaten Sukabumi dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum memiliki ikatan koordinasi yang baik sehingga pada pelaksanaannya setiap aktor selalu menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dihadapi sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya belum ada pembagian peran yang jelas yang melibatkan para aktor terkait peran apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Berbagai penelitian juga menyuguhkan hasil penelitian yang kurang lebih sama dengan menyatakan bahwa dukungan serta kolaborasi antar aktor yang baik sangat dibutuhkan oleh pemerintah selaku aktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan-pelayanan publik termasuk pelayanan di bidang pendidikan

Terdapat gap antara fakta dan kondisi ideal yang terjadi di lapangan. Kondisi ideal pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pendidikan bermutu yang dapat diakses oleh setiap elemen masyarakat sebagai salah satu bentuk hak masyarakat sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sukabumi masih sulit untuk dijangkau oleh sebagian besar masyarakatnya hal ini dibuktikan dengan tingginya angka putus sekolah serta angka buta huruf di Kabupaten Sukabumi, kedua indikator tersebut sangat mempengaruhi indeks pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang menjadi cerminan bahwa kualitas pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih harus ditingkatkan.

Dari permasalahan terkait kurang baiknya proses kolaborasi antar aktor dalam model pentahelix dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan teori administrasi publik menurut Chandler dan Plano, teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, teori peran aktor menurut Blackman, dan teori jaringan aktor menurut Callon dan Latour Richard, maka akan ditarik kesimpulan berupa solusi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Kerangka berpikir pada penelitian ini merupakan dasar penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan kajian kepustakaan. Uraian kerangka berpikir menjelaskan mengenai hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian atau variabel relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

Operasional Konsep

Identifikasi Aktor

Identifikasi aktor adalah tahapan mengidentifikasi ketertarikan aktor yang terlibat, yaitu:

- a. Aktor primer
- b. Aktor Sekunder

Peran aktor

Peran aktor adalah peran yang dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat dalam menjalankan tugas serta fungsinya, yaitu:

- a. Informan
Aktor yang berperan sebagai sumber informasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi
- b. Konsultan
Aktor yang dimintai pendapat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi
- c. Kerjasama
Aktor yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi
- d. Kontrol
Aktor yang melakukan kegiatan pengawasan dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi

Model Jaringan

Model Jaringan adalah konsep yang terjalin antara aktor-aktor yang terkait dalam merencanakan, mengimplementasikan serta melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kebijakan sektor publik, model jaringan dipengaruhi oleh seberapa banyak aktor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

- a. *Triple Helix*
- b. *Quadruple Helix*
- c. *Penta Helix*

1.6. Fenomena Penelitian

Tabel 1.4

Fenomena Penelitian

| No. | Fenomena | Sub Fenomena | Gejala yang Diamati | Informan dan Cara Pengumpulan data |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Identifikasi aktor | Aktor Primer | Ketertarikan aktor atau hal yang memotivasi aktor untuk ikut terlibat dalam pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi | Informan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 2. Sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi 3. Sekretaris Pengabdian Masyarakat FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi 4. Yayasan Adzkia Damari Sukabumi |
| | | Aktor Sekunder | | |
| 2 | Peran Aktor | Informan | Aktor yang berperan sebagai sumber informasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi | |
| | | Konsultan | Aktor yang dimintai pendapat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi | |
| | | Kerjasama | Aktor yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi | |
| | | Kontrol | Aktor yang melakukan kegiatan pengawasan dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi | |
| 3 | Model Jaringan | <i>Penta Helix</i> | Konsep yang terjalin antara aktor-aktor yang terkait dalam kolaborasi | |
| | | <i>Triple Helix</i> | | |
| | | <i>Quadruple Helix</i> | | |

Sumber : Penulis

1.7. Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi jawaban atau rumusan masalah yang ada sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada literatur dan dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang ada. Namun, strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui model pentahelix dapat menjadi solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan atau kerjasama dengan pihak lain. Berbagai lembaga harus saling berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media yang tertuang dalam konsep pentahelix.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini termasuk penelitian dasar. Adapun penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono:2011).

Data disajikan melalui pendekatan Studi Kasus (*Case Study*). Studi kasus atau *case-study* adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus (Raco, 2010:67). Peneliti menggunakan studi kasus yang bersifat deskriptif tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk menangkap objek penelitian serta mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan. Situs Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kabupaten Sukabumi. Dipilihnya Kabupaten Sukabumi sebagai situs penelitian karena disamping luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang besar dan jaraknya yang tak terlalu jauh dari Ibu Kota, Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sukabumi bila diukur dari (APM), (APK) serta fasilitas infrastruktur penunjang pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih menjadi salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Barat.

1.8.3. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan judul penelitian yang diteliti tentang Model Helix dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Maka subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah akademisi, perusahaan, masyarakat, pemerintah serta media sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam model helix.

1.8.4. Jenis Data

Sugiyono (2015:13) menjelaskan jenis data dalam penelitian terdiri dari data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan diantara keduanya. Data kualitatif merupakan data yang terdiri dari kumpulan kata-kata, gambar, serta tulisan-tulisan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana penulis berperan sebagai instrument penelitin itu sendiri. Menurut Sugiyono (2015) data kualitatif berbentuk kata, skema, dan gambar.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dengan data berupa kumpulan teks atau kata-kata tertulis peneliti dapat mendeskripsikan gambaran umum dalam penelitiannya terkait strategi kerja sama yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dan *Stakeholder* lainnya dengan model pentahelix dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data adalah segala Sesutu yang dapat memberikan informasi untuk penelitian terkait. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan sumber atau informan. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:187). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan aktor-aktor terkait dalam model helix dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi yaitu Akademisi, perusahaan, masyarakat, media, serta pemerintah daerah setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer berupa studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015:187). Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini berupa literatur, jurnal, artikel, berita dalam situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peningkatan kualitas pendidikan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:137) teknik pengumpulan dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumen.

1. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Riyanto (2010:82) *interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur (wawancara terstruktur adalah wawancara dengan pedoman pertanyaan).

3. Dokumen

Menurut Raco (2010 : 111), dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau

korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual sebagai bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini berupa tulisan, gambar, atau dan lain sebagainya.

1.8.7. Pengelolaan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas data. Sugiyono (2015:267) berpendapat bahwa suatu validitas dalam penelitian kualitatif merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Hal ini berarti data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang ada sesungguhnya. Untuk melihat validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti melakukan pengumpulan berbagai sumber data dengan teknik yang sama dengan wawancara melalui narasumber terkait upaya para aktor dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

1.8.8. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mencakup studi pustaka dan transkrip wawancara langsung. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (dalam Sugiono, 2011:246). Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus, serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian, reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan, atau tabel.

4. Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, kesimpulan dilakukan oleh peneliti, dan peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti

langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan penggunaan software ATLAS. Software ATLAS.ti memiliki keunggulan dalam membantu penelitian karena dapat membaca berbagai macam jenis data khususnya pada penelitian kualitatif. ATLAS.ti dapat membantu peneliti mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur.

Kegunaan ATLAS.ti pada penelitian ini adalah membantu peneliti menganalisis data dengan cara coding, penyajian data, dan pemberian kesimpulan. Software ini dapat memberi gambaran jaringan yang mampu menelusuri hubungan dari hasil penelitian untuk dianalisis.